

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PT
ADARO INDONESIA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN REPUBLIK INDONESIA

Submission date: 11 Jan 2022 07:01 PM (UTC+0700)
by Reno Affrian, Agus Sukristyanto 1171800017

Submission ID: 1740055517

File name: Administrasi_1171800017_Reno_Affrian.docx (472.7K)

Word count: 4448

Character count: 31242

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT ADARO INDONESIA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REPUBLIK INDONESIA

Reno Affrian, Agus Sukristyanto, Bambang Kusbandrijo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : renoaffrian@gmail.com agussukris@untag-sby.ac.id b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

PT Adaro Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan batubara dengan produksi terbesar ke-3 di dunia, salah satu lokasi penambangan terletak di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia, Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan tahun 2016 - 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya, Bank Indonesia (BI) wilayah Kalimantan Selatan tahun 2019 sektor pertambangan masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Balangan, jika dicermati hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan bila dilihat dari salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, secara teoritis disebutkan bahwa pemberdayaan tidak boleh menimbulkan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat.

Penelitian ini berujuan untuk (1) Menganalisis kebijakan program *corporate social responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dalam Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan, (2) Menganalisis dampak program *corporate social responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Balangan dan (3) Menemukan model evaluasi kebijakan program yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan landasan filosofis postpositivesme, Penentuan informan secara purposive (bertujuan), Teknik Analisa yang digunakan adalah *data condensation, data display, verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan program *corporate social responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan belum terlaksana secara optimal, (2) dampak program CSR PT Adaro Indonesia yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Balangan, (3) model evaluasi kebijakan program peneliti kembangkan adalah : 1. Manajemen Pengelolaan, 2. Program yang ditetapkan, 3. Kelompok Sasaran, 4. Implementasi dan 5. Dampak. Saran yang diberikan, kepada pihak berwenang perlu melakukan desain ulang terhadap pengelolaan dana CSR PT Adaro Indonesia pada Kabupaten Balangan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan ² Program, *corporate social responsibility* (CSR) Pemberdayaan Masyarakat

Latar Belakang

² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha

dibidang dan atau kegiatan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan

batubara dengan produksi terbesar ke 3 di dunia (CNBC Indonesia). Lokasi kantor operasional PT Adaro Indonesia terletak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan lokasi penambangan terletak di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan.

PT Adaro Indonesia melaksanakan program *corporate social responsibility* (CSR) di sekitar lokasi pertambangan sebagai wujud tanggung jawab atas dampak operasional perusahaan. Menurut Suharto (2008) *Corporate social responsibility* operasi bisnis dengan komitmen yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan finansial, melainkan juga untuk membangun sosial-ekonomi kawan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. (Aras & Crowther, 2019 :23) Frynas (2009 :6) menjelaskan bahwa sebuah program dapat dikenali sebagai tanggung jawab perusahaan atas dampak usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan selatan tahun 2016 - 2019, neraca pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan merupakan yang terendah diantara Kabupaten/ Kota lainnya di Kalimantan selatan, dengan pertumbuhan ekonomi 2,53 persen, Kabupaten balangan menempati urutan 13 dari 13 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan Selatan tahun 2019 Sektor pertambangan masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya permasalahan jika dilihat dari salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, secara teoritis disebutkan bahwa Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, akan tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin

memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya; Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat.

Berdasarkan uraian data yang disajikan baik pada aspek ge teoritis maupun aspek fenomena empiris, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi program *corporate social responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan, analisis dampak program *corporate social responsibility* PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat kabupaten Balangan, serta menemukan model evaluasi yang tepat dalam kebijakan program pemberdayaan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Laster & Stewart (2000:126) dalam Agustino (2017 :163) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria dan standar yang dibuat. William N Dunn Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment)

Model Evaluasi Kebijakan

¹ Lester dan Steward, Jr (2000) mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi

empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

James Anderson (2011:276-278) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan public menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan public yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan public, kedua evaluasi yang memfokuskan pada bekerja kebijakan, ketiga evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur pencapaian disbanding target yang ditetapkan.

Jones (1984:359) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu:

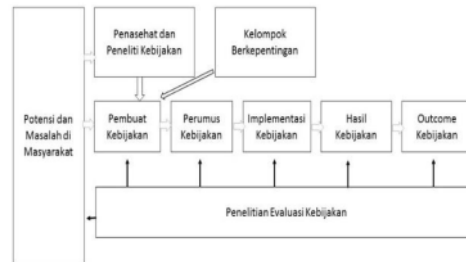
1. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-election*, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye.
2. *Organizational evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.

3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

Model Keley

Penelitian Evaluasi kebijakan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan menggunakan prinsip-prinsip dan metode evaluasi untuk menilai isi, Implementasi dan dampak dari suatu kebijakan.

Gambar 01
Lingkup Penelitian Evaluasi Keley



Keley sebagaimana dikutip oleh Sugiono (2017:532), evaluasi kebijakan berada pada sebuah komponen dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan pembuat kebijakan akan merumuskan kebijakan berdasarkan pemikirannya sendiri, sasaran dari penasehat atau peneliti, dan memasukkan dari tokoh masyarakat, partai dan pemerintah.

1. Potensi dan Masalah kebijakan
Penelitian kebijakan dapat melakukan penelitian evaluasi terhadap potensi dan masalah kebijakan, yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan dokumen dan

pendapat para peserta rapat dan diskusi kelompok dalam membuat suatu kebijakan. Kemungkinan hasilnya adalah potensi dan masalah relevan atau tidak relevan dengan rumusan kebijakan.

2. Profil Pembuat kebijakan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil pembuat kebijakan, kelompok kepentingan dan atau kelompok penekan, Profil bisa dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, agama tempat tinggal, keikutsertaan dalam organisasi politik dan sosial, kualifikasi kompetensi, dan kepentingannya dalam suatu kebijakan.

3. Rumusan Kebijakan

Penelitian ini terkait dengan proses perumusan kebijakan, berapa lama suatu kebijakan dibuat, orang-orang yang terlihat dalam perumusan kebijakan, ide-ide yang dilontarkan pada saat diskusi dalam perumusan kebijakan, tujuan kebijakan, uji publik, sosialisasi dan ruang lingkup isi kebijakan, kejelasan isi rumusan kebijakan, tujuan penelitian pada bagian ini adalah untuk mengetahui latar belakang kebijakan tersebut dirumuskan, dan seberapa baik rumusan kebijakan difahami dan bermanfaat bagi orang-orang yang dikenai kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Penelitian implementasi kebijakan sama dengan penelitian proses pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama penelitian pada aspek ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program-program yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Lingkup yang diteliti dalam implementasi kebijakan adalah yang berkaitan dengan strategi implementasi kebijakan, sumber daya untuk pelaksana kebijakan, kualifikasi

dan kompetensi pelaksana kebijakan, sistem monitoring pelaksana kebijakan.

5. Penelitian output

Penelitian terhadap produk yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan atau output kebijakan tercapai. Output yang dinilai adalah kualitas, kuantitas, manfaat, efisiensi dan efektifitas sumber daya dan biaya yang digunakan untuk menghasilkan output yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan,

6. Outcome Kebijakan

Penelitian pada outcome atau dampak kebijakan adalah penelitian yang berkaitan dengan akibat positif atau negatif dari pencapaian output. Bila output tercapai atau tidak tercapai apakah akibat positif dan negatifnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, filsafat Postpositivisme sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna. Penelitian ini di fokuskan pada pendekatan fenomenologi, pendekatan yang mencoba menggali dan menemukan pengalaman¹ hidup manusia terhadap diri dan hidupnya. Data yang diolah penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang langsung didapat dilap¹angan melalui wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, data sekunder adalah data yang telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari media, dokumentasi dan arsip dari Lembaga terkait, metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data, *Condensation, display dan conclusion drawing/verification*.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan teori evaluasi kebijakan Keley (1997) sebagai *guidence* penelitian. Atas dasar ini maka aspek yang dievaluasi berkaitan dengan. 1. Potensi dan Masalah Kebijakan, 2. Profil Kebijakan, 3. Rumusan Kebijakan, 4. Implementasi, 5 Output, dan 6. Outcome.

1. Potensi dan Masalah Kebijakan

Perumusan program CSR PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan potensi dan masalah kebijakan, hal tersebut diliat dari Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dibentuk melalui Sk Bupati Balangan belum sepenuhnya melaksanakan pendekatan partisipatif, mapping, investigasi kebutuhan masyarakat dalam perumusan suatu kebijakan program, sehingga konsep *corporate social responsibility* belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan misi CSR itu sendiri.

2. Profil Kebijakan

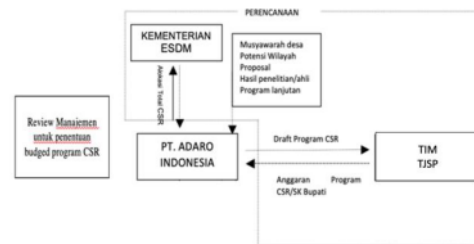
Berdasarkan keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/328/Kum Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2021 diketahui bahwa unsur Tim perumus program CSR PT Adaro Indonesia diisi oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan eselon kepangkatan dipemerintah daerah. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Sekretaris Tim, dan beberapa unsur kepala dinas selaku anggota Tim tanggung jawab sosial perusahaan yang diamanahi untuk merumuskan program CSR PT Adaro Indonesia. Jika dicermati tim tersebut belum melibatkan berbagai unsur, seperti LSM,

Akademisi, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan unsur kelompok kepentingan lainnya. Idealnya pembuat kebijakan memerlukan masukan dari berbagai sektor, yang nantinya diharapkan memeberikan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga peran serta kelompok kepentingan diperlukan dalam perumusan suatu program, mengikutsertakan kelompok kepentingan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi program-program yang telah dirumuskan. apalagi konsep pemberdayaan merupakan konsep idealnya adalah melibatkan berbagai sektor.

3. Rumusan Kebijakan

Berikut alur mikanisme perumusan program CSR PT Adaro Indonesia.

Gambar 02
Mekanisme Perumusan Program CSR
PT Adaro Indonesia



Sumber : diolah peneliti hasil wawancara 2021

Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dominasinya unsur aparatur pemerintah tidak memberikan peluang kepada masyarakat atau kelompok kepentingan untuk berpartisipasi secara maksimal. Dominanya Tim tanggung jawab sosial perusahaan dalam perencanaan dan penetapan program juga akan mengantarkan CSR masuk dalam politik penguasa, meskipun melibatkan pemerintah kabupaten level kepada dinas dalam perencanaan, tumpeng tindak program akan tetap saja

terjadi karena Tim tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) tidak sepenuhnya mengetahui tentang keadaan desa, hal ini berkaitan dengan tidak adanya dilibatkan kecamatan, desa, dan masyarakat dalam fase perencanaan, penetapan program oleh tim TJSP juga belum menggunakan pendekatan potensi dan masalah masyarakat kabupaten balangan, mikanisme perumusan program juga belum menggunakan pendekatan investigasi, mapping, mengapa program tersebut dilaksanakan, apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada akhirnya banyak program salah sasaran, keluar dari kontek atau konsep pemberdayaan, sehingga program CSR PT Adaro Indonesia yang ditetapkan belum memberikan dampak positif bagi masyarakat balangan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan Pemerintah dalam program Corporate Sosial Responsibility (CSR) secara konsep umumnya sudah memadai, namun pada tatanan implementasi belum optimal, Anggran CSR yang disediakan oleh pihak Adaro meliputi Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, dan lingkungan, pelaksanaan program belum berjalan dengan efektif, kegiatan program belum sepenuhnya dilakukan uji publik, partisipatif, serta masih rendahnya kompetensi perumus kebijakan program corporate social responsibility, tim tanggung jawab sosial perusahaan yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati balangan belum memahami konsep atau visi CSR itu sendiri.

5. Output Kebijakan

Program CSR PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Balangan khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa PT Adaro Indonesia hanya

memberikan dana kepada desa ring 1 desa yang terdampak operasional pertambangan belum maksimalnya dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga manfaat belum sepenuhnya terlihat optimal.

6. Outcome Kebijakan

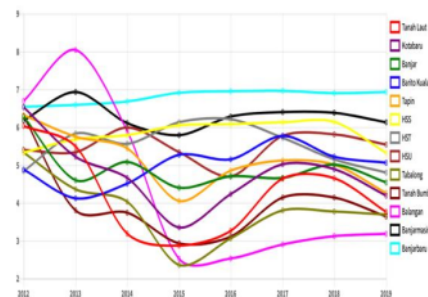
Outcome CSR PT Adaro Indonesia pada bidang Infrastruktur telah berjalan dengan baik, akan tetapi pada bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan belum sepenuhnya memberikan dampak positif, belum terlihatnya outcome program *Corporate sosial responsibility* PT Adaro Indonesia pada bidang pemberdayaan masyarakat, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan program sampai pada tataran pelaksanaan program, sehingga program yang pemberdayaan masyarakat belum berdampak positif bagi masyarakat kabupaten balangan.

Dampak Program *Corporate Social Responsibility* bagi masyarakat Kabupaten Balangan.

1. Dampak Ekonomi

Gambaran ekonomi balangan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 03
Kondisi Ekonomi Kab. Balangan



Sumber : data.kalselprov.go.id

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah se- Kalimantan selatan sejak tahun 2016 – 2019. Mencermati dari data tersebut maka program pemerintah dan program CSR PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan.

2. Dampak Pendidikan

Berdasarkan data bapsm-kalsel.or.id diketahui bahwa : Akreditasi Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA bervariasi. Pada tingkat SD 1 Sekolah Mendapatkan Nilai 65 Akreditasi D tidak terakreditasi, Sebanyak 16 Sekolah Mendapatkan nilai C terakreditasi 9 Sekolah mendapatkan nilai B terakreditasi dan 1 Sekolah SD Mendapatkan Nilai Akreditas A. jika dilihat dari budget CSR PT Adaro Indonesia tahun 2018-2020 pada bidang pendidikan bantuan CSR PT Adaro Indonesia alokasi dana lebih terdistribusikan pada bantuan beasiswa pendidikan tinggi, tidak sepenuhnya langsung pada proses bantuan mengajar, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program CSR PT Adaro belum sepenuhnya memberikan dampak positif pada proses dan hasil pendidikan di Kabupaten Balangan.

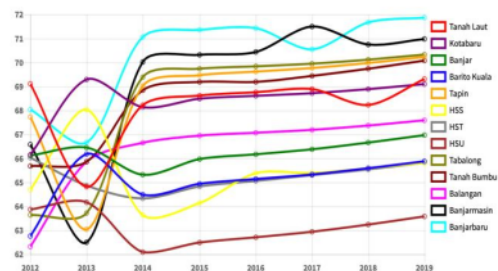
3. Dampak kesehatan

Program CSR PT Adaro Indonesia bidang Kesehatan berupa bantuan Penyediaan Air Bersih, KIBBLA, Sekolah Sehat, Bakti Sosial Kesehatan, Operasi Katarak Gratis dan Infrastruktur Support Kesehatan. Diliat dari beberapa program kesehatan yang dijalankan CSR PT Adaro Indonesia, bidang kesehatan memberikan dampak positif bagi usia harapan hidup masyarakat Kabupaten

Balangan. berikut tren angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Balangan.

Gambar 04

Tren Pertumbuhan Hidup Kab. Balangan



Sumber : data.kalselprov.go.id

4. Dampak Sosial Budaya

Program PT Adaro Indonesia pada bidang Sosial Budaya, terbagi dua kegiatan, pertama bidang Pembinaan Seni dan Budaya dan kedua pembinaan Olahraga. Secara dampak pembangunan PT adaro Indonesia berperan positif dalam pembangunan sarana dan prasarana Seni, Budaya dan Olahraga. akan tetapi dari segi pemberdayaan dampak positif masih belum sepenuhnya optimal khususnya bagi suku Dayak pitap, diketahui bahwa, masyarakat Kabupaten balangan terdiri dari suku Banjar, yang disebut orang batang Balangan atau pauk Balangan, dan suku Dayak yang merupakan bagian dari suku Dayak meratus, (Dayak pitap). Fasilitasi kegiatan bagi suku Dayak selama ini masih bersifat event / kegiatan tahunan, masih sedikit program CSR PT adaro Indonesia untuk pemberdayaan suku Dayak pitap.

5. Dampak Lingkungan

Program bidang lingkungan bertujuan untuk melakukan indentifikasi potensi lingkungan di sekita masyarakat, wilayah operasional yang dapat dijadikan upaya peningkatan kualitas lingkungan, Program

CSR PT Adaro Indonesia pada bidang lingkungan berupa program pengelolaan sampah 3R, Pendidikan lingkungan hidup dan energi terbarukan, dari beberapa program yang telah di jalankan pada bidang lingkungan belum sepenuhnya memberikan dampak positif, hal tersebut dikarenakan program lingkungan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang timbul akibat kegiatan tambang, dampak negatif yang timbul dimasyarakat kebisingan, air tercemar, rusaknya jalan dan hilangnya flora dan fauna di daerah tambang.

Model evaluasi Kebijakan Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka peneliti mengemukakan model evaluasi kebijakan program, sebagai berikut :

Gambar 05
Model Evaluasi Kebijakan Program



Sumber : diolah Reno Affrian

Dalam pengelolaan suatu program perlu melibatkan masyarakat sehingga program yang ditetapkan akan menumpuhkan partisipasi masyarakat, pada gambar 05 tentang model penelitian

evaluasi kebijakan program dapat dijelaskan pendekatan kolaboratif menghindari pembuat kebijakan yang bersifat top down atau pendekatan dari atas kebawah, pendekatan evaluasi kebijakan program yang kolaboratif mempunyai fungsi pendekatan dari yang bersifat Bottom- up atau dari bawah keatas, program kegiatan berdasarkan masukan dari masyarakat penerima program yang kemudian disusun dan direalisasikan dalam bentuk program kegiatan. Untuk melakukan evaluasi kebijakan program apakah program bersifat kolaboratif dapat dilakukan mulai dari

Pada gambar diatas dapat dijelaskan model evaluasi kebijakan program sebagai berikut :

1. Manajemen Pengelolaan
Peneliti Kebijakan dapat melakukan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan, bahan evaluasinya adalah dimulai dari perencanaan program, bahan-bahan yang digunakan dalam perumusan kebijakan program, profil pembuat kebijakan program, pembagian tugas dan fungsi pelaksana program, standar prosedur (SOP) dan koordinasi antar kelompok kepentingan.
2. Program yang di tetapkan
Apakah program yang telah ditetapkan merupakan kebutuhan kelompok sasaran, bahan evaluasinya adalah mengapa program tersebut diadakan, apakah program tersebut sesuai dengan potensi masalah dan sesuai dengan kebutuhan palangan.
3. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran berkaitan dengan penerima manfaat program, bahan evaluasinya adalah, ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat.
4. Implementasi
Implementasi kebijakan program adalah untuk mengetahui seberapa jauh program-program yang telah ditetapkan

dapat diimplementasikan, bahan evaluasinya adalah terkait sumberdaya, komunikasi, sosial politik, strategi implementasi, dan sistem monitoring.

5. Dampak

Dampak kebijakan program adalah penilaian terhadap program yang telah dijalankan, apakah program tersebut berdampak positif atau negatif, bahan evaluasinya adalah kemanfaatan program, kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan bagi masyarakat luas atau pihak yang dikenai kebijakan program.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. PT Adaro Indonesia merealisasikan tanggung jawab sosialnya melalui beberapa program, yaitu 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang Pendidikan, 3. Bidang Kesehatan, 4. Bidang Sosial budaya, dan 4. Bidang lingkungan. Proses perumusan dan penetapan program CSR PT Adaro Indonesia dilakukan oleh TIM Kerja tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang dibentuk dan ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Balangan. susunan Tim TJSP terlihat jelas diisi oleh aparat pemerintah daerah berdasarkan eselon atau jabatan structural tanpa melibatkan level Kecamatan, Desa, LSM, Lembaga Indevenden, Akademisi maupun Masyarakat Sekitar tambang, Dominannya peran pemerintah melalui Tim TJSP menyebabkan program CSR hanya untuk kepentingan pemerintah kabupaten bukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga hakikat CSR dalam konteks Pemberdayaan Masyarakat belum optimal. Pada sisi lain keterlibatan pemerintah yang terlalu dominan pada perencanaan dan penganggaran program

membawa CSR masuk dalam kepentingan politik pengusaha.

2. Peran CSR PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Balangan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah se-Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. tentunya program-program yang telah ditetapkan pada bidang ekonomi belum berjalan efektif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan. Bidang pendidikan juga belum memberikan dampak positif, hal tersebut dilihat dari peringkat mutu sekolah, sarana dan prasarana pembelajaran yang belum sepenuhnya memenuhi standar nasional pendidikan, bantuan CSR bidang pendidikan lebih terdistribusikan pada bantuan beasiswa pendidikan tinggi, sangat minim pada proses bantuan mengajar, sehingga program pendidikan belum memberikan dampak positif. Bidang Kesehatan, dilihat dari beberapa program kesehatan yang dijalankan bidang kesehatan memberikan dampak positif. Berdasarkan data rilis Badan pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Balangan mengalami tran peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya,. Artinya program CSR PT Adaro Indonesia berperan positif terhadap dampak Kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan. Program Sosial Budaya belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi suku Dayak pitap, pemberdayaan bagi suku Dayak pitap masih bersifat event/ kegiatan tahunan, masih minimnya program yang langsung menyentuh suku Dayak pitap. Bidang lingkungan dari beberapa program yang telah di jalankan pada bidang lingkungan belum sepenuhnya memberikan dampak positif,

hal tersebut dikarenakan program lingkungan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang timbul akibat kegiatan tambang, dampak negatif yang timbul dimasyarakat kebisingan, air tercemar, rusaknya jalan dan hilangnya flora dan fauna di daerah tambang. Rendahnya factor dampak positif pada program CSR PT Adaro Indonesia berhubungan dengan lemahnya perencanaan oleh TIM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Tim dalam perumusan program belum menggunakan pendekatan kajian investigasi, mapping kebutuhan masyarakat, sehingga program yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan dengan potensi dan masalah masyarakat.

3. Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu model konsep Evaluasi Kebijakan Program yakni, 1 Manajemen Pengelolaan, 2 Program yang ditetapkan, 3 Kelompok Sasaran, 4. Implementasi dan 5 Dampak

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, saran penelitian berikutan yaitu :

1. Pihak yang berwenang perlu melakukan desain ulang pengelolaan program CSR dengan melibatkan kelompok kepentingan.
2. Kepada TIM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) perlu menekankan pendistribusi alokasi dana CSR pada program pemberdayaan masyarakat sehingga program tersebut berdampak jangka Panjang.
3. Selanjutnya kepada Pihak yang berkepentingan kedepannya dapat melakukan evaluasi dengan pendekatan model evaluasi kebijakan program yang peneliti kembangkan.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab,2008,*Pengantar Analisis*

Kebijakan Publik. Hak Terbit Pada UMM Press

Achwan, Rocham. 2006 Corporate Social Responcibility : pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan, GALANG, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Volume 1 No. 2

Ahmad, Juhaidi, 2012, *Program CSR Pendidikan Perusahaan Tambang Batu Bara (Telaah Kritis Terhadap Disktribusi dan Alokasi dana CSR Pendidikan PT Adaro Indonesia untuk sekolah dan Madrasah di Kabupaten Balangan dan Tabalong Kalimantan Selatan, Jurnal Pendidikan. Vol XIV. No.1 April 2012*

Adi, Fahrudin,2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung. PT Refika Aditama
Agustino,Leo,2009,*Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta

Agustino,Leo.2009. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung Alfabeta

Amir Muhidin (2017) “Evaluasi kebijakan publik (studi kesiapan desa menerima dana desa di kabupaten gowa)” Disertasi program pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Asa Ria Pranoto Dede Yusuf (2014) “Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij aya. JPS Volume 18, Nomor 1, Juli 2014 (39-50) ISSN 1410-4946

Ali,Faried, et al.,2012, *Studi Analisis*

Kebijakan, Bandung, PT Refika Aditama

- Aras, Güler, and David Crowther, (2009), “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Context”, dalam Güler Aras and David Crowther, (Ed), *Global Perspectives on Corporate Governance and CSR*, Farnham Surrey : Gower Publishing Limited
- Besse Asniwaty (2010) “Evaluasi pelaksanaan corporate sosial Responsibility csr Pt. Pupuk kaltim” *Jurnal Eksis* Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267 – 1266 ISSN :0216-6437
- ³ Bugin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Prenada Media Group
- Danim Sudarwan, 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Cv Pustaka Setia Deasy Wulandari (2012) “Peranan *corporate social responsibility* sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan” *jeam* vol xi no.2/2012. *issn: 1412-5366*
- ³ Denhardt V. Janet, Denhart B. Robert, 2013, *Pelayanan Publik Baru*, Kreasi Wacana
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Data.kalselprov.go.id
- Fajar, Mukti. 2009. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia* tentang penerapan Ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional Swasta Nasional & BUMN di Indonesia
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Fauziah Yuni Aran Tika, Imam Hanafi, Riyanto (2012) “ Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (studi pada pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri perkotaan di kecamatan batu kota batu)” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2,
- Fedrik Litaniawan dan Suasa (2014) “ Kebijakan program nasional pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan pada kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong” *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.06 No 01 Februari 2014* ISSN 1411- 3341
- Fischer, Frank, et al., 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*, Bandung, Nusa Media
- Haedar (2015) “Evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kelurahan kabonga besar kecamatan banawa kabupaten donggala” *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, Mei 2015* ISSN: 2302-2019
- Hartini Retnaningsih (2015) *Permasalahan corporate social responsibility (csr) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*

- Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Islamy,Irfan Muh 2017. Kebijakan Publik, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka
- Jinurain (2017) “Evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak pertambangan bahan galian batuan (studi kasus) di kecamatan labuan Kabupaten donggala” *e-Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 165-178 ISSN: 2302-2019*
- Kabupaten Balangan dalam Angka 2021
- Kartini,Dwi. 2003. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustaibility Mangement dan Implementasi di Indonesia*, Bandung Refika Aditama
- Kiu, Yunnir Melany. (2018). “Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang” *JAKPP* pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
- Karatas Hakan,Fer Savel. (2011) *CIPP Evaluation model scale : developmen, reliability and validity, Procedia Social and Behavioral Scince 15 (2011) 592 - 599*
- Kokom komariah, evi novianti, hanny hafiari, dan fx. ari agung prastowo (2017) “Sinergi pemerintah dan perusahaan pada aktivitas *csr* dalam rangka menghadapi *mea*” *kawistara volueme 7 issn 2088-5415 (print) issn 2355- 5777 (online)*
- Ko Kuan Vheng.-C., Nie, Juan Ran, Roang., & Gu, Yuan. (2020). *Corporate social responsibility, social identity, and innovation performance in China. Pacific-Basin Finance Journal, 63, 101415.* doi:10.1016/j.pacfin.2020.101415
- Mardikanto, Totok. 2013. *Konsep Konsep Pemberdayaan Masyarakat : acuan bagi aparat birokrasi, akademi, praktis, dan peminat// pemerhati pemberdayaan masyarakat.* : Lembaga Pengembangan Pendidikan LPP UNS Press.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mark Anthony Camilleri (2017) *Corporate sustainability and responsibility: creating value for business, society and the environment : Camilleri Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility (2017)2:59–74 DOI 10.1186/s41180-017-0016-5*
- Mardikanto Totok, Soebianto Soebianto Poerwoko.2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perpektif kebijakan public.* Bandung Alfabeta
- Muhammad Firyal Akbar (2016) “Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah” *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN :2460-6162 / eISSN : 2527-*

- Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B. (2004). *Qualitative data Analysis : a Methods Sourcebook*/Metthew B. Miles, A. Micheal Huberman, Johnny Saldana, Arizona State University_Tird Edision
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Netty Dyah Kurniasari (2015) “ Program csr berbasis pemberdayaan masyarakat (untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil menengah di madura) *Jurnal NeO-Bis* Volume 9, No. 1, Juni 2015
- Nugroho, Rian 2014. *Public Policy* (Edisi keempat revisi 2012) Jakarta PT Gramedia
- Noorsyamsa Djumara dan R. Utaryana Natawiriyana (2014) “Evaluasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Pada PT Telekomunikasi Indonesia, TBK” (*Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI Nomor 1 April 2014*)
- N. Nurlaela Arif, Dkk, 2019. *Evaluating implementation of a CSR program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A case study of Global Geopark Ciletuh*. Arfican *Journal of Hospitality, Tourism and leisure* GCBSS Special Edition (2019) ISSN : 2223-814X
- Prastowo dan Huda, 2011. *Corporate Social Responsibility : Kunci Merah Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta, Samudra Biru
- Rahmadani Santoso Tri Raharjo², Risna Resnawaty (2008) “Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” *Social Work Jurnal*. ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v8i2.20081
- Riyadi, Sujono & Purwanto, Teguh. 2009. *Asuhan Keperwata Jiwa*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Santosa, imam, 2018. *Pengembangan Masyarakat berbasis Sumberdaya Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Said, Zain dan Hamid Abidin (2004) *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Piramedia
- Saidi, Zaim, 2003, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta PIRAC dan Ford Foundation
- ³ Satiri, Djam'an dan Komariah, Aan, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*, Cv Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- , 2017. *Metologi Penelitian Kebijakan, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & B dan Penelitian Evaluasi*, Bandung : Alfabeta
- Wirawan, 2016. *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar aplikasi dan profesi PT. RAJAGRAFINDO PERSADA*

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT ADARO INDONESIA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REPUBLIK INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

6%

2

www.neliti.com

Internet Source

3%

3

anzdoc.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%